

PEMKOT PALANGKA RAYA DIMINTA SIAPKAN LAHAN UNTUK DAPUR UMUM



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Syaufwan Hadi meminta pemerintah kota menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum.

Hal tersebut dilakukan, untuk mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto yang telah resmi berjalan di beberapa wilayah di Indonesia.

"Namun di Kalimantan Tengah, terutama di Palangka Raya belum melaksanakan program asta cita presiden tersebut. Padahal, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pernah meninjau langsung simulasi di sekolah yang terletak di Palangka Raya," katanya, Jumat.

Untuk itu, dapur umum harus segera dibangun di setiap kecamatan yang ada di Palangka Raya sehingga ke depan makan bergizi dapat dilaksanakan. Dia menyampaikan dapur umum yang dibangun harus memenuhi standar yang diperlukan, yakni berukuran 15x15 meter dan 20x20 meter.

"Jadi ada dua macam luas dapur. Ini untuk proses memasak yang nyaman dan tentunya petugas bisa leluasa menyiapkan makan siang bergizi," ucapnya.

Syaufwan juga memaparkan, saat dia bersama jajaran anggota DPRD Palangka Raya melakukan perjalanan dinas, ia sempat meninjau lokasi dapur umum di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Satu dapur umum di kota tersebut, bisa mencakup radius empat hingga lima kilo meter, sehingga proses persiapan menjadi lebih efektif.

"Mungkin jika di Palangka Raya, bisa mencakup lebih jauh lagi. Tetapi tergantung apakah dapur tersebut dibangun di wilayah padat penduduk atau bukan," ujarnya.

Untuk material pembangunan, lanjut Syaufwan, petugas dapur umum di Semarang sudah mempersiapkannya dengan material anti api. Mengenai biaya, DPRD bersama

Pemerintah Kota Palangka Raya sudah membahasnya di forum badan anggaran, bahkan program itu sudah dianggarkan di dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Namun kemungkinan belum terlaksana karena pemkot belum menerima juknis dan juklak lebih lanjut dari pemerintah pusat," demikian Syaufwan.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/739686/pemkot-palangka-raja-diminta-siapkan-lahan-untuk-dapur-umum>, Jumat, 10 Januari 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/01/10/102238778/palangka-raja-siapkan-lahan-untuk-dapur-umum-makan-bergizi-gratis>, Jumat, 10 Januari 2025.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Dalam Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada Pasal 52 disebutkan, Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 mendefinisikan, Pemberian Makan Bergizi Gratis adalah Program pemberian makan dengan menu lengkap serta memiliki kandungan gizi seimbang sesuai dengan anjuran kontribusi zat gizi terhadap kebutuhan gizi kelompok sasaran sekali makan baik makan pagi atau makan siang. Penerima Manfaat kegiatan Program MBG adalah seluruh siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, pesantren, sekolah keagamaan dan pendidikan layanan khusus serta ibu hamil, ibu menyusui dan anakbalita di sekitar lokasi SPPG (dalam radius 6km/waktu tempuh maksimal 30 menit). Sumber Pendanaan untuk membiayai kegiatan program MBG Tahun 2025 berasal dari DIPA APBN Badan Gizi Nasional tahun 2025 yang dialokasikan di 500-937 SPPG pada awal bulan Januari-Februari 2025, di 2.000 SPPG di bulan April 2025 dan di 5.000 SPPG di Bulan Juli 2025 yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.